

**PENURUNAN REPRESENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PARTAI ACEH PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN
PIDIE PROVINSI ACEH**

Saifullah

NPP. 31.0033

*Asal Pendaftaran Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

E-mail: saifullahsaleh31@gamil.com

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si

ABSTRACT

Problem (GAP): *Decrease in Representation of Members of the Aceh Party's People's Representative Council in the 2019 Election in Pidie Regency, Aceh Province. Purpose:* to analyze the causes of the decline in representation of Aceh Party DPRD members in Pidie Regency. **Method:** used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews (9 informants), observation and documentation. This research uses Pitkin's (1967) Representation theory which includes four dimensions: representative representation, those represented, the substance of representation, and political context. **Results:** The findings obtained by the author in this research are the decrease in representation of members of the Aceh Party's People's Representative Council in the 2019 elections. Representative representation is considered sufficient because work commitment is considered less than optimal, those represented are classified as good, the substance of the representatives is classified as not good, and the political context also classified as not good. **Conclusion:** The decline in seats for the Aceh Party faction in the Pidie DPRD in the 2019-2024 elections was caused by unrealized promises, lack of member commitment, and exclusive internal party dynamics. Despite opportunities from the mass base of ex-combatants and political history, challenges such as internal conflict and conservatism stand in the way. Adaptive strategies for the 2024 elections involve strengthening networks, recruiting quality legislative candidates, and social media campaigns.

Keywords: *Representation, Aceh party, Decline in representation.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penurunan Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Aceh Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. **Tujuan:** untuk menganalisis penyebab penurunan representasi anggota DPRD Partai Aceh di Kabupaten Pidie. **Metode:** yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (9 informan), observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Keterwakilan

Pitkin (1967) yang meliputi empat dimensi: representasi wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan konteks politik. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penurunan Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Aceh Pada Pemilu Tahun 2019 pada representasi wakil tergolong cukup karena komitmen kerja dinilai kurang optimal, yang diwakili tergolong baik, substansi perwakilan tergolong tidak baik, dan konteks politik juga tergolong tidak baik. **Kesimpulan:** Penurunan kursi fraksi Partai Aceh di DPRD Pidie pada pemilu 2019-2024 disebabkan oleh janji yang tidak terealisasi, kurangnya komitmen anggota, dan dinamika internal partai yang eksklusif. Meskipun ada peluang dari basis massa eks kombatan dan sejarah politik, tantangan seperti konflik internal dan konservatisme menghambat. Strategi adaptif untuk pemilu 2024 melibatkan penguatan jaringan, rekrutmen caleg berkualitas, dan kampanye media sosial.

kata kunci : Keterwakilan, Partai Aceh, Penurunan Representasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005 adalah akhir dari konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh sekaligus menjadi awal dari harapan baru bagi seluruh Rakyat Aceh untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih aman, serta lebih damai. Melalui penandatanganan MoU tersebut, Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang lebih mandiri melalui penerapan desentralisasi asimetris baik itu pada sektor ekonomi, politik, dan hukum. Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh dalam urusan politik adalah mendirikan partai politik lokal. Kewenangan menyelenggarakan partai politik lokal di Aceh tertuang dalam butir 1.2.1 MoU Helsinki.

Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan salah satu kewenangannya adalah mengizinkan pembentukan partai lokal di Aceh. Pembentukan partai lokal di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik. Aceh merupakan daerah pertama di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk membentuk partai politik lokal.

Partai politik lokal adalah partai politik yang ada dan berwenang di tingkat lokal baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota. Karena ruang lingkungannya terbatas pada suatu wilayah tertentu, partai politik lokal tidak memiliki kepengurusan di

tingkat pusat atau nasional. Partai lokal sepenuhnya mengandalkan dukungan dari suatu daerah tertentu.

Secara konstitusional, pembentukan partai lokal di Aceh adalah sebagai upaya memelihara semangat perdamaian sekaligus meningkatkan semangat demokrasi masyarakat Aceh. Berdasarkan beberapa sumber yang tersedia, tujuan utama diizinkan pembentukan partai politik lokal sebenarnya untuk menjaga dan merawat perdamaian pasca MoU Helsinki dan secara khusus diharapkan setelah berdirinya partai-partai lokal di Aceh dapat menjadi instrumen dan sarana bagi masyarakat Aceh pada umumnya dan khususnya bagi para eks Gerakan Aceh Merdeka sebagai bentuk perjuangan berdemokrasi tanpa mengangkat senjata dan pertumpahan darah dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Aceh.

Partai Aceh adalah salah satu partai lokal yang ada di Aceh serta merupakan partai lokal terbesar berdasarkan dominasi keterwakilan kadernya dalam kancah perpolitikan Aceh sejak hadirnya partai-partai lokal dalam dinamika perpolitikan Aceh, baik itu legislatif maupun eksekutif. Menurut sumber yang didapat peneliti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh pada pemilihan umum 2009 Partai Aceh memperoleh 46,91% suara sah, dengan jumlah kursi yang diraih adalah 33 dari 69 kursi di parlemen Aceh. Ditingkat kabupaten/kota, pada pemilu 2009 Partai Aceh meraih total 221 kursi yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Perolehan kursi Partai Aceh kabupaten/kota pada pemilu 2009 yaitu:

Tabel 1.1

Perolehan Kursi Partai Aceh di Setiap Kabupaten/Kota Pasca Pemilu Tahun 2009 di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Kursi
1	Pidie	34
2	Aceh Utara	32
3	Bireun	25
4	Pidie Jaya	16
5	Aceh Jaya	14
6	Lhokseumawe	14
7	Aceh Timur	13
8	Aceh Barat Daya	12
9	Aceh Selatan	10
10	Aceh Besar	10
11	Aceh Barat	7
12	Banda Aceh	6
13	Sabang	6
14	Langsa	6
15	Nagan Raya	4
16	Aceh Tengah	3
17	Aceh Tamiang	3
18	Simeulue	2
19	Bener Meriah	2

20	Gayo Lues	1
21	Aceh Tenggara	1
22	Aceh Singkil	0
23	Subulussalam.	0
Jumlah Total		221

Sumber: Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwasanya masyarakat Aceh sangat antusias dengan hadirnya partai lokal khususnya Partai Aceh pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, karena merupakan pemilihan umum pertama yang mengikutsertakan partai politik lokal Aceh pada pemilihan umum legislatif Provinsi Aceh. Dalam konteks demokrasi, sudah sewajarnya partai-partai politik saling bersaing untuk merebut hati pemilih. Jarang sekali partai politik dapat bertahan di negara demokrasi jika mereka tidak mampu menyelaraskan ideologi dan kepribadian mereka dengan pemimpin yang dapat meyakinkan masyarakat. Karena masyarakat akan berperan besar dalam menang atau tidaknya sebuah partai politik dalam pemilu.

Setelah menjadi partai yang mendominasi dalam dua periode pemilihan umum di Aceh, pengaruh Partai Aceh mulai berkurang pada pemilu 2014 dan 2019. Pada pemilu legislatif tahun 2014 Partai Aceh harus kehilangan 4 kursi serta pada pemilu legislatif tahun 2019 Partai Aceh kehilangan 11 kursi di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kursi Partai Aceh di parlemen provinsi dan kabupaten/kota menurun drastis. Bisa dikatakan sejak Partai Aceh pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 2009, ini adalah pencapaian terburuk mereka.

Tabel 1.2

Jumlah Kursi Partai Aceh dari Total 81 Kursi Legislatif di Parlemen DPR Aceh Hasil Pemilu Tahun 2009, 2014, dan 2019

Tahun	Jumlah kursi	Keterangan
2009-2014	33	Ketua DPRA
2014-2019	29	Ketua DPRA
2019-2024	18	Ketua DPRA

Sumber: Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh 2023

Sementara di Kabupaten Pidie yang menjadi lokus penelitian peneliti pada penelitian ini Partai Aceh juga mengalami penurunan keterwakilan anggota partainya pada parlemen legislatif tingkat kabupaten/kota dimana pada pemilu tahun 2009 Partai Aceh meraih lebih dari 50% kursi di parlemen yaitu 34 dari 40 kursi yang ada. Kemudian pada pemilu legislatif tahun 2014 Partai Aceh kehilangan 11 kursi parlemen DPRK Pidie, dan pada pemilu tahun 2019 Partai Aceh hanya mampu merebut 9 kursi parlemen DPRK Pidie.

Tabel 1.3

Jumlah Kursi Partai Aceh dari Total 40 Kursi Legislatif di Parlemen DPR Kabupaten Pidie Hasil Pemilu Tahun 2009, 2014, dan 2019

Tahun	Jumlah kursi	Keterangan
2009-2014	34	Ketua DPRK
2014-2019	23	Ketua DPRK
2019-2024	9	Ketua DPRK

Sumber: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie 2023

Taufik Al-Mubarak (2019) mengungkapkan faktor-faktor mengapa kursi Partai Aceh terus menurun dan berkurang salah satunya adalah karena banyak kader potensial Partai Aceh yang memilih hijrah ke partai nasional untuk maju sebagai caleg di tingkat pusat atau DPR RI, selain itu berkurangnya kursi Partai Aceh dikarenakan kurangnya kaderisasi anggota partai yang dilakukan Partai Aceh sehingga para calon anggota legislatif yang diusung oleh Partai Aceh banyak pendatang baru dan bukan kader potensial sehingga kurang memiliki daya jual di hadapan masyarakat, hal ini jelas mempunyai dampak negatif terhadap internal Partai Aceh baik secara matematis maupun politik. Namun, peneliti menilai bahwa informasi yang disampaikan para pengamat perlu diverifikasi secara akademis dan ilmiah, karena selain faktor yang disebutkan tentu ada faktor lain yang menyebabkan penurunan drastis kursi dari Partai Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie, yang menjadi lokus penelitian saat ini.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dinamika penurunan perolehan kursi Partai Aceh, maka penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai “Penurunan Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Aceh Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh”.

1.2 Kesenjangan Masalah

Penurunan kursi Fraksi Partai Aceh di DPRD Kabupaten Pidie menunjukkan kesenjangan dalam keterwakilan politik yang signifikan. Pada periode pertama, Partai Aceh meraih 34 dari 40 kursi legislatif, menunjukkan dominasi mutlak. Namun, pada periode kedua, jumlah kursi turun menjadi 23, dan pada periode ketiga, hanya tersisa 9 kursi. Meskipun mengalami penurunan drastis, Partai Aceh masih menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Pidie. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam dukungan politik serta kemungkinan masalah internal dalam partai, seperti kaderisasi yang kurang efektif dan perpindahan kader potensial ke partai nasional. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan kepercayaan dan dukungan masyarakat, serta perlunya strategi baru untuk meningkatkan keterwakilan politik yang stabil dan berkelanjutan

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Hafijal (2022) berjudul “Analisis penurunan perolehan kursi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pemilu Legislatif” mengungkap beberapa faktor kunci yang mempengaruhi penurunan kursi partai tersebut. Sistem pemilu proporsional terbuka dan metode Sainte-Laguë dianggap mempengaruhi

hasil pemilu. Penurunan kursi diduga akibat evaluasi negatif terhadap kinerja partai sebelumnya dan persepsi masyarakat terhadap integritas serta kualitas personal calon legislatif. Hafijal merekomendasikan Partai Aceh untuk introspeksi, meningkatkan strategi kampanye, seleksi calon yang lebih cermat, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Penekanan juga diberikan pada pentingnya perbaikan komunikasi politik dan adaptasi terhadap dinamika politik lokal yang kompleks.

Skripsi Taufiq Adetya (2018) berjudul "Elektabilitas Partai Politik Lokal Dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh" meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas partai politik lokal, khususnya Partai Aceh, dalam dua peristiwa politik penting. Penelitian ini mencakup analisis strategi kampanye, kinerja partai, persepsi masyarakat, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi preferensi pemilih. Adetya mengkaji perubahan pola dukungan pemilih dari pemilu legislatif ke pilkada serentak, dan dampak kebijakan lokal serta nasional. Skripsi ini juga membahas peran tokoh lokal, pengaruh media, dan efektivitas mesin partai. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran dukungan signifikan antara kedua peristiwa politik dan memberikan rekomendasi bagi partai politik lokal untuk meningkatkan strategi dalam menghadapi pemilu mendatang.

Skripsi Dian Maulana (2016) berjudul "Penyebab Menurunnya Suara Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Banda Aceh" menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara Partai Demokrat di daerah tersebut. Penelitian ini mencakup evaluasi kinerja partai, persepsi masyarakat terhadap partai dan calon legislatifnya, serta pengaruh isu-isu nasional dan lokal. Maulana menemukan bahwa kombinasi dari kinerja yang kurang memuaskan, isu-isu korupsi yang melibatkan tokoh partai, dan strategi kampanye yang tidak efektif berkontribusi terhadap penurunan suara partai pada pemilu legislatif 2014.

Skripsi Murlian Suhelmi (2020) berjudul "Analisis Marketing Politik Partai Lokal Aceh (Studi Kekalahan Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif DPRK Simeulue Tahun 2019)" menganalisis strategi marketing politik yang digunakan oleh Partai Aceh dan faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan partai tersebut dalam pemilu legislatif di DPRK Simeulue tahun 2019. Penelitian ini mengevaluasi aspek-aspek seperti komunikasi politik, strategi kampanye, pengelolaan citra, serta keterlibatan dan respons masyarakat terhadap partai. Suhelmi menemukan bahwa kekalahan Partai Aceh disebabkan oleh kurang efektifnya strategi marketing politik, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta persaingan yang kuat dari partai lain. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan kampanye yang lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi pemilih.

Skripsi berjudul "Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017" karya Muhammad Nur, Usman, dan Irwan Safwadi (2018) menganalisis interaksi dan persaingan antara partai politik lokal dan nasional

dalam pemilihan kepala daerah di Aceh pada tahun 2017. Penelitian ini mengeksplorasi strategi politik, koalisi, dan taktik kampanye yang digunakan oleh kedua jenis partai dalam upaya memenangkan pemilu. Studi ini juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih di Aceh, seperti isu identitas lokal, kinerja partai sebelumnya, dan pengaruh tokoh politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik di Aceh sangat dipengaruhi oleh identitas lokal dan sejarah konflik, yang memberikan keunggulan tertentu bagi partai lokal. Namun, partai nasional juga memainkan peran penting melalui strategi koalisi dan adaptasi terhadap konteks lokal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji dinamika Penurunan Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Aceh Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian bertema dinamika politik lokal yang terjadi di kabupaten Pidie Provinsi Aceh ini memberikan pemahaman baru bagi aktor-aktor politik ditingkat lokal terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempertahankan eksistensi partai lokal dalam dinamika politik khususnya di wilayah Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab menurunnya representasi anggota DPRK dari Partai Aceh, di Kabupaten Pidie. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi dan respon masyarakat terhadap penurunan representasi anggota Partai Aceh, dalam komposisi DPRD Kabupaten Pidie. Untuk mengetahui Strategi Adaptif yang dilakukan oleh Partai Aceh, untuk meningkatkan jumlah suara dan representasi di DPR Kabupaten Pidie.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan berpikir secara induktif sehingga dapat memberi gambaran mengenai dinamika Penurunan Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Aceh Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. . Lingkup penelitian yang diambil oleh peneliti berpedoman dari teori keterwakilan Hannah Pitkin tahun 1960, yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Representasi Wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, Konteks politik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai yaitu Sekjen Dewan Pimpinan Wilayah partai Aceh Kabupaten Pidie, anggota legislatif dari fraksi partai Aceh, dan masyarakat yang direpresentasikan oleh komunitas Agama, komunitas Adat, dan komunitas Muda dalam Kabupaten Pidie. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang kemudian dianalisis berdasarkan Miles dan Huberman (2017) yang terdiri dari penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penurunan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Aceh di Kabupaten Pidie

3.1.1 Representasi Wakil

Menurut Pitkin (1967) wakil adalah orang yang dipilih oleh masyarakat dalam sebuah pemilihan umum. Dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, perwakilan didominasi oleh fraksi Partai Aceh. Namun, pada pemilu periode 2019-2024, keterwakilan Partai Aceh di DPRD Pidie mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun masih mendominasi dan menjadi pemenang pemilu, penurunan jumlah kursi yang dialami cukup signifikan. Terdapat 9 anggota dari Partai Aceh dengan berbagai posisi seperti Ketua DPRK, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan anggota biasa (KIP Pidie, 2019). Kualitas seorang anggota dewan dapat dinilai dari beberapa aspek, salah satunya adalah umur yang berkaitan dengan akumulasi pengalaman hidup yang dapat mengembangkan kebijaksanaan, pemahaman, dan keterampilan. Rata-rata anggota dewan dari fraksi Partai Aceh berada pada usia 40-an tahun, yang dianggap sebagai usia matang baik secara emosional maupun finansial. Selain umur, tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas anggota dewan, dengan sebagian besar anggota dewan dari fraksi Partai Aceh memiliki pendidikan tinggi, yaitu empat orang berpendidikan sarjana dan satu orang magister, sementara sisanya berpendidikan setingkat SMA/ sederajat. Pengalaman juga menjadi faktor penting, dimana banyak anggota dewan dari Partai Aceh merupakan pemenang pada pemilu periode sebelumnya. Komitmen kerja anggota dewan sangat menentukan kemenangan dalam pemilu berikutnya, salah satu indikatornya adalah tingkat kehadiran dalam rapat paripurna yang merupakan forum utama untuk membahas isu-isu penting dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Tingkat kehadiran mereka bervariasi, dengan beberapa anggota hadir dalam sebagian besar rapat, sementara yang lain tidak hadir dalam sejumlah rapat penting. Kehadiran dalam rapat paripurna menjadi kunci untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi rakyat benar-benar didengar dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kualitas dan komitmen kerja anggota dewan dari fraksi Partai Aceh cukup baik. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan terhadap penurunan kursi Partai Aceh pada pemilu tahun 2019-2024. Calon dengan rekam jejak baik dan integritas tinggi lebih mungkin untuk mendapatkan dukungan pemilih (Labolo, 2018).

3.1.2 Yang Diwakili

Dimensi yang diwakili dalam konsep teori perwakilan politik Pitkin mencakup pemilik hak suara yang merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan dan sebagai bentuk kepercayaan rakyat. Untuk menguji alasan penurunan kursi suatu partai, selain dilihat dari calon legislatif, perlu juga memperhatikan tingkat kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi. Menurut Elidawati, anggota DPRD dari fraksi Partai Aceh di Kabupaten Pidie, terjadi pergeseran signifikan dalam dinamika politik lokal yang mempengaruhi hubungan antara masyarakat

dan Partai Aceh, dengan masyarakat semakin kritis terhadap kinerja anggota dewan dan menuntut transparansi, akuntabilitas, serta tindakan konkret. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie, M. Iriawan, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh bisikan-bisikan eksternal yang menyebutkan bahwa Partai Aceh terlalu fokus pada mempertahankan kekuasaan. Dr. Imran Abu Bakar, Wakil Ketua MPU Pidie, menyebutkan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh disebabkan oleh janji-janji yang tidak terealisasi. Zulkarnaini (2023) menyebutkan bahwa pemilu 2024 menjadi ujian berat bagi partai politik lokal di Aceh, khususnya Partai Aceh, yang menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan yang masih tinggi dan kasus korupsi yang menjerat sejumlah kadernya. Kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh mulai luntur, seperti yang diungkapkan oleh Syamsuddin dan Asnawi, dua warga Pidie yang meragukan kepemimpinan partai tersebut Zulkarnaini (2023).

3.1.3 Substansi Perwakilan

Evaluasi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap substansi perwakilan kelompok agama, adat, dan muda di Pidie, Aceh, menunjukkan variasi komitmen dan perhatian. Menurut Dr. Imran Abu Bakar, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, komitmen anggota DPR fraksi Partai Aceh terhadap komunitas agama berbeda-beda, dengan partisipasi yang sering kali bersifat individual dan kurang melibatkan tokoh agama dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini menyebabkan kekecewaan masyarakat karena kebijakan yang dihasilkan tidak selalu tepat sasaran. Dalam konteks adat, Tengku Athaillah, Ketua Majelis Adat Aceh Pidie, menilai bahwa anggota DPR fraksi Partai Aceh kurang memperhatikan pelestarian nilai-nilai adat, bahkan terkesan mengabaikan komunitas adat dalam kegiatan prioritas budaya. Sebaliknya, Edi Syaputra, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pidie, menyatakan bahwa anggota DPR fraksi Partai Aceh cukup peduli terhadap kepentingan kelompok muda, terutama dalam mendukung kegiatan olahraga, dengan beberapa anggota aktif memberikan bantuan dan berkomunikasi dengan komunitas olahraga setempat. Komitmen ini terlihat baik, baik dalam konteks personal maupun komunal, meskipun motivasinya bisa jadi karena mengincar suara pemilih muda yang dominan di Kabupaten Pidie.

3.1.4 Konteks Politik

Sistem partai mencakup struktur dan dinamika partai politik dalam suatu wilayah, termasuk hubungan antara partai politik dan sistem pemilihan umum yang mempengaruhi pembentukan partai Duverger (1972). Sistem internal partai, seperti pengambilan keputusan, struktur organisasi, dan mekanisme akuntabilitas, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan partai dalam pemilu. Eksklusivisme organik dalam Partai Aceh menghambat partisipasi individu non-kombatan, berdampak negatif pada perolehan kursi di parlemen, sebagaimana disampaikan oleh Sekjen DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie, yang menyarankan partai untuk lebih terbuka demi meningkatkan elektabilitas. Budaya politik mencakup pola perilaku dan orientasi politik masyarakat, dengan Verba (1963) membaginya

menjadi parokial, subjek, dan partisipan. Partai Aceh sering gagal dalam konsistensi pelaksanaan programnya, menyebabkan citra negatif di masyarakat karena perbedaan pendapat dan ego pribadi kader, menurut Sekjen DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie. Evaluasi dan perbaikan budaya politik diperlukan untuk membangun citra yang kuat dan terpercaya. Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka dan metode Sainte Lague untuk menentukan perolehan kursi legislatif, yang dianggap merugikan Partai Aceh karena banyak suara partai terbuang. Sekjen DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie menyatakan bahwa sistem sebelumnya lebih menguntungkan Partai Aceh karena memungkinkan memperoleh kursi patah. Namun, peneliti menekankan pentingnya sistem pemilu yang adil dan representatif untuk memastikan setiap suara dihargai dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas tanpa memihak pada satu partai politik.

3.2 Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap Penurunan Representasi Anggota Partai Aceh Dalam Komposisi DPRK Pidie

Penurunan kursi DPRK Pidie Partai Aceh dianggap sebagai hal yang wajar dalam politik, sebagaimana dijelaskan oleh Sekjen DPW Partai Aceh Muhammad Iriawan, SE. Beliau mengemukakan bahwa kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan awal, seperti otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan, dengan kenyataan partai yang hanya berpartisipasi dalam sistem politik yang lebih luas. Fenomena ini mirip dengan ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan SBY yang tidak sepenuhnya terpenuhi, menyebabkan kekecewaan. Dalam pandangan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie, Dr. Imran Abu Bakar, M.Sy, kekalahan adalah momentum untuk introspeksi dan perbaikan, serta dorongan untuk partai menjadi lebih inovatif dan responsif dalam menghadapi pemilu selanjutnya. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, Tengku Athaillah, melihat kegagalan Partai Aceh sebagai indikasi kinerja yang buruk di mata masyarakat, yang semakin kritis dalam menilai kontribusi dan kinerja partai. Kegagalan ini memerlukan introspeksi dan reformasi internal agar partai bisa memperbaiki kinerjanya dan membangun kembali kepercayaan publik. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie menambahkan bahwa kekalahan juga berkaitan dengan kualitas personal calon legislatif, yang kini menjadi faktor penting dalam menarik dukungan masyarakat. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis tidak hanya memperhatikan afiliasi partai tetapi juga rekam jejak dan integritas calon. Oleh karena itu, Partai Aceh perlu melakukan introspeksi mendalam, meningkatkan seleksi calon, dan melakukan reformasi untuk merespons aspirasi rakyat secara lebih efektif. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki citra partai dan memastikan dukungan yang lebih luas dalam konteks politik yang kompetitif.

3.3 Strategi Adaptif Yang Dilakukan Partai Aceh Untuk Meningkatkan Jumlah Suara Dan Representasi Di DPRD Kabupaten Pidie

Menurut Bennett dalam Putra (2010:10) strategi adaptif merupakan pola yang terbentuk dari banyaknya penyesuaian yang dilakukan oleh akal manusia, bertujuan untuk mendapatkan serta menggunakan sumber daya dan

menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara cepat. Dalam konteks partai politik adalah kemampuan partai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan politik, sosial, dan lainnya. Strategi adaptif melibatkan tren-tren baru, kebutuhan pemilih, dan dinamika politik yang berkembang, serta menyesuaikan *platform*, pesan, dan strategi komunikasi untuk tetap relevan dan efektif.

3.3.1 Strategi Partai Aceh

Strategi Partai Aceh dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2024 mendatang partai perlu mengorganisir kegiatan kampanye. Menurut Arifin dalam Ardial (2010:73) menyatakan bahwa strategi politik yaitu semua keputusan yang disesuaikan pada keadaan saat ini tentang perilaku yang akan digunakan untuk mencapai tujuan politik dimasa yang akan mendatang. Sedangkan makna lain dari strategi politik adalah ilmu tentang cara penggunaan pertempuran untuk mencapai sebuah kemenangan dalam perang. Merujuk pada teori pembangunan yang dikemukakan oleh (Huntington, 1965) bahwa partai politik juga harus mengikuti proses modernisasi dalam segala aspek. Maka dari itu, partai politik dapat memperkenalkan diri dan juga harus menyesuaikan *branding-politic* nya dengan era sekarang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Bapak Muhammad Iriawan, S.E, ada beberapa strategi yang dilakukan Partai Aceh dalam menghadapi pemilu 2024, namun beliau enggan menyampaikan strategi yang bersifat sangat khusus mengingat berbicara perihal strategi adalah sebuah rahasia yang tidak bisa dengan mudah disampaikan kepada pihak eksternal atau pihak yang tidak terafiliasi dan terlibat secara praktis dalam keanggotaan Partai Aceh “yang tertulis secara konseptual tidak ada, tetapi ketika ada rapat-rapat selalu kita bahas dan tekankan. kami juga merasa strategi secara khusus tidak sepenuhnya bisa kami sampaikan palingan secara umumnya saja yang bisa kami sampaikan”.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan Partai Aceh untuk meningkatkan jumlah suara dan representasi di DPRD Kabupaten Pidie sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Bapak Muhammad Iriawan, S.E, diantaranya yaitu:

1. Mencuri *start* untuk pendekatan politik secara serius kepada jejaring-jejaring akar rumput dari eks kombatan atau keluarga Kombatan yang sudah ada sebelumnya,
2. Dewan Pimpinan Wilayah mengintruksikan secara masif dan terus menerus kepada ranting di kecamatan untuk senantiasa menguatkan barisan partai,
3. Menguasai daerah-daerah basis pemilih kombatan secara utuh,
4. Merekrut caleg yang baik secara *track record* maupun gagasannya,
5. Memerintahkan kader-kader diranting untuk lebih ulet dalam mengambil hati pemilih,
6. Mengarahkan semua kader untuk sebaik mungkin tidak ada yang berkonflik atau berseteru dengan masyarakat,

7. Mengarahkan caleg untuk memetakan progres peraihan massa yang sudah dicapainya secara berkala,
8. Mengarahkan kepada caleg untuk tidak terlalu nyaman hanya berkampanye di daerah desa atau kecamatannya saja, namun juga harus mengait para pemilih dari desa atau kecamatan lain yang tentunya masih berada dalam satu daerah pilih,
9. Mengkampanyekan citra dan *branding politic* partai melalui media sosial yang dilakukan secara rutin oleh sayap partai.

3.3.2 Peluang dan Tantangan Partai Aceh

Partai Aceh memiliki potensi untuk menghadapi peluang besar dan tantangan yang signifikan dalam menerapkan strategi yang adaptif ditengah dinamika politik yang terus berubah. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Jenderal Partai Aceh Bapak Muhammad Iriawan, S.E beliau menyebutkan diantara peluang-peluang yang potensial dimiliki oleh Partai Aceh sehingga akan mampu membangkitkan kembali citra dan eksistensi Partai Aceh diantaranya yaitu:

1. Partai Aceh mudah membangun jaringan karena basis massanya adalah eks kombatan GAM dan keluarga besar Kombatan yang jumlahnya masih sangat ramai dan kuat.
2. Partai Aceh punya sejarah latar belakang berdirinya partai yang tidak ternilai dalam identitas politik Aceh.
3. Partai lokal di Aceh yang mampu mengalahkan pamor partai nasional di wilayah Aceh.

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi Partai Aceh menjelang pemilu 2024 diantaranya yaitu:

1. Konflik internal dalam tubuh dewan pimpinan wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie, puncaknya pada pilkada Pidie tahun 2017 adanya kandidat yang didukung oleh sebagian eks kombatan namun partai secara resmi mengusung ketua dewan pimpinan wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie.
2. Konservatisme internal, pimpinan dan beberapa anggota partai enggan untuk mengubah cara mereka beroperasi atau mempertimbangkan ide-ide dan terobosan-terobosan baru yang bersifat kekinian.
3. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya aparatur (kader dan simpatisan partai) maupun sumber daya finansial.
4. Perubahan dinamika politik, perubahan dinamika politik yang cepat dan tidak terduga yang mengakibatkan menurunnya citra Partai Aceh dimata masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Penurunan kursi fraksi Partai Aceh di DPRD Pidie pada pemilu 2019-2024 diakibatkan oleh beberapa faktor penting. Meskipun kualitas anggota fraksi Partai Aceh cukup baik, dengan pendidikan yang memadai dan pengalaman sebelumnya, masalah komitmen dan kehadiran dalam rapat paripurna mempengaruhi persepsi

masyarakat. Kekecewaan terhadap janji-janji yang tidak terealisasi dan kritik atas fokus partai yang lebih pada mempertahankan kekuasaan juga berperan. Dalam konteks substansi perwakilan, anggota fraksi Partai Aceh kurang memperhatikan komunitas agama dan adat, meskipun cukup peduli terhadap kelompok muda. Dinamika internal partai yang eksklusif menghambat partisipasi individu non-kombatan, serta ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program, memperburuk citra partai. Persepsi masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja partai, serta kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader, menurunkan kepercayaan.

Strategi adaptif Partai Aceh untuk pemilu 2024 melibatkan penguatan jaringan di akar rumput, merekrut caleg berkualitas, dan kampanye melalui media sosial. Partai Aceh perlu introspeksi dan reformasi untuk merespons aspirasi rakyat secara lebih efektif. Meskipun partai memiliki peluang seperti basis massa eks-kombatan dan identitas politik yang kuat, mereka juga menghadapi tantangan seperti konflik internal, konservatisme, keterbatasan sumber daya, dan perubahan dinamika politik yang cepat. Upaya adaptasi ini diharapkan dapat memperbaiki citra dan eksistensi Partai Aceh dalam kancah politik lokal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penurunan kursi dewan perwakilan rakyat Partai Aceh di Kabupaten Pidie pada pemilu 2019 berjalan dengan baik bagi masyarakat namun tidak berjalan dengan baik bagi kepentingan Partai Aceh. Masyarakat mulai mengetahui sisi negatif dari Partai Aceh sehingga berdampak buruk dan mengancam eksistensi Partai Aceh.

Keterbatasan Penelitian. penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga peneliti hanya membatasi beberapa informan pada tiap-tiap indikator yang mudah dijangkau oleh penulis agar dapat melaksanakan penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dengan waktu yang lebih lama dan informan yang ditambahkan berkaitan dengan penurunan representasi anggota dewan perwakilan rakyat Partai Aceh pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama ditujukan kepada Partai Aceh Kabupaten Pidie yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. indeks.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Title. Jakarta. PT. Grafindo.
- Dian Maulana. (2016). *Penyebab Menurunnya Suara Partai Demokrat Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Banda Aceh*. Universitas Syiah Kuala.
- Duverger, M. (1972). *The Study Of Politics*. Crowell.
- Hafijal. (2022). *Analisis Penurunan Perolehan Kursi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pemilu Legislatif 2019*. Uin Ar-raniry.
- Huntington, S. P. (1965). Political Development and Political Decay. *World Politics, Vol. 18, N.*
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2017). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muhamad Labolo. (2018). *Dinamika Politik Partai Lokal*. Universitas Gadjah Mada Press.
- Muhammad Nur, Usman, dan I. S. (2018). *Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh Tahun 2017*. Universitas Syiah Kuala.
- Murlian Suhelmi. (2020). *Analisis Marketing Politik Partai Lokal Aceh (Studi Kekalahan Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif DPRK Simeulue Tahun 2019)*. Universitas Syiah Kuala.
- Pitkin, Hanna Fenichel. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Putra, A. (2010). *Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Taufik Al-mubarak. (2019). *Senjakala Partai Aceh?* <https://kumparan.com/acehkini/senjakala-partai-aceh-1r3QAivcmgb>
- Taufiq Adetya. (2018). *Elektabilitas Partai Politik Lokal Dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Verba, A. and. (1963). *The civic culture: political attitudes and democracy in five nations*. Princeton university press.
- Zulkarnaini. (2023). *Pemilu 2024 Bakal Jadi Ujian Berat Parpol Lokal di Aceh*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/15/pemilu-2024-ujian-berat-partai-lokal-di-aceh>